

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM: ANALISIS TERHADAP PROSES DEMOKRASI

Nazwa Salsabila Zahratu¹, Irwan Triadi²

salsabilanazwa633@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum: Analisis Terhadap Proses Demokrasi yang berfokus pada Peranan Partai Politik serta melibatkan Pemilihan Umum dan demokrasi. Metodologi pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penulisan serta melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap informasi-informasi yang relevan. Peran partai politik dalam pemilihan umum memastikan keterwakilan dan pluralisme dalam proses demokrasi. Partai politik dianggap oleh sistem politik Indonesia sebagai sarana utama untuk mengatur demokrasi di negara ini; dengan kata lain, demokrasi tidak dapat hidup di Indonesia tanpa partai politik. Oleh karena itu, undang-undang yang berkaitan dengan partai politik sangat penting untuk menjamin perkembangan organisasi politik yang bermoral dan dijalankan secara profesional. Pemilihan umum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi di mana warga negara memiliki hak untuk memilih para pemimpinnya. Artikel ini diharapkan dapat menginspirasi individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah positif untuk memperkuat peran partai politik dalam proses demokrasi, baik melalui partisipasi politik aktif maupun advokasi reformasi politik. Artikel ini juga dapat memberikan pemikiran baru kepada para pembuat kebijakan tentang reformasi politik yang dapat memperkuat proses demokrasi dan memperbaiki sistem pemilu.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilihan Umum, Demokrasi.

Abstract : This article discusses the Role of Political Parties in General Elections: Analysis of the Democratic Process which focuses on the Role of Political Parties and involves General Elections and democracy. A normative juridical approach methodology was used in this research. This research uses literature study as a data collection method. Researchers use secondary data collection, namely information collected from the literature by reading books, journals, and other literature sources related to writing and conducting searches and reviews of relevant information. The role of political parties in elections ensures representation and pluralism in the democratic process. Political parties are considered by the Indonesian political system as the primary means of organizing democracy in the country; in other words, democracy cannot exist in Indonesia without political parties. Therefore, laws relating to political parties are essential to ensure the development of moral and professionally run political organizations. General elections are one of the main foundations in a democratic system where citizens have the right to choose their leaders. This article is expected to inspire individuals, groups and communities to take positive steps to strengthen the role of political parties in the democratic process, both through active political participation and advocacy of political reform. It may also provide policy makers with new ideas on political reforms that can strengthen the democratic process and improve the electoral system.

Keywords: Political Party, General Election, Democracy.

PENDAHULUAN

Para pendiri Republik Indonesia telah memandang "demokrasi" sebagai bentuk pemerintahan yang ideal sejak Negara Kesatuan didirikan. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan dan gagasan sesuai dengan idiom nasional dalam sistem politik yang demokratis. Namun, setiap warga negara pada umumnya memiliki seperangkat keyakinan, watak, dan kecenderungan politik yang unik. Partai-partai politik telah melembagakan hal ini. Oleh karena itu, secara umum dapat dilihat bahwa partai politik adalah perkumpulan individu yang anggotanya memiliki pandangan, prinsip, dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik melalui cara-cara konstitusional, seperti pemilihan umum, dan mempertahankannya setelah kekuasaan itu diperoleh untuk melaksanakan agenda mereka. Partai politik, dalam berbagai bentuknya (reformis, revolusioner, nasionalis, dan lain-lain), secara historis terkait erat dengan modernisasi masyarakat Barat dan telah menjadi alat modernisasi di negara-negara berkembang. Di semua masyarakat modern, partai politik memainkan peran penting dalam mewujudkan modernisasi spesifik yang diadopsi oleh setiap masyarakat, yang sering kali didikte oleh partai-partai yang berkuasa.

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara periodik adalah mekanisme yang demokratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang tanggung jawab utama atas keberhasilan pelaksanaan pemilu. Tentu saja, hal ini membutuhkan pendanaan dan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, partai politik, dan birokrasi pemerintah. Beragamnya kelompok yang membentuk masyarakat Indonesia akan berpengaruh pada praktik penyelenggaraan negara di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut akan memiliki kepentingannya masing-masing, yang kemudian akan memunculkan kecenderungan bagi kelompok-kelompok masyarakat tersebut untuk bersatu, atau paling tidak, kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tujuan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, tak perlu dikatakan lagi bahwa kelompok-kelompok yang beragam di dalam masyarakat ini membutuhkan wadah untuk mengekspresikan tujuan mereka. Salah satu wadah terbaik untuk dapat menyalurkan aspirasi berbagai kelompok di Indonesia adalah mekanisme demokrasi yang disalurkan melalui pemilihan umum yang terdiri dari partai-partai yang ikut serta dalam pemilihan umum.

Di dalam negara, partai politik dan sistem politik negara memiliki berbagai tujuan strategis. Salah satu tujuan tersebut adalah fungsi input, yaitu partai politik berfungsi sebagai sarana tidak hanya untuk rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik, tetapi juga untuk agregasi dan/atau ekspresi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam negara, terutama dalam membantu pemerintah yang berdaulat untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini akan tercapai sehubungan dengan proses pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Namun jika kita melihat situasi saat ini, sebagian besar masyarakat meremehkan peran dan fungsi partai politik karena menganggap partai politik tidak lagi dapat mewakili aspirasi masyarakat dan mengagregasi kepentingan dan kedaulatan mereka. Sebaliknya, mereka melihat partai politik hanya sebagai kendaraan bagi sebagian orang untuk memajukan karir politik mereka dan melupakan peran dan fungsi strategisnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai sejauh mana peran partai politik dalam politik negara, terutama dalam hal mendorong pemerintahan yang berdaulat untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Tidak diragukan lagi bahwa pengembangan sistem kepartaian dan sistem pemilu berkaitan erat dengan pembangunan struktur pemerintahan. Jika sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia sesuai dengan UUD 1945, maka sistem ini perlu diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem pemilu legislatif, sistem kepartaian, dan sistem pemilu Presiden, serta melekat pada pemilihan kepala daerah. Dalam setiap sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi

dan fungsi yang sangat strategis. Partai politik secara strategis berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan jalannya pemerintahan. Bahkan, banyak orang berpendapat bahwa partai politik adalah pihak yang benar-benar mendefinisikan demokrasi. Oleh karena itu, partai merupakan pilar penting dalam sistem politik demokratis yang harus diperkuat (*the degree of institutionalization*). Partai politik, pada kenyataannya, sering kali digunakan sebagai kendaraan politik bagi sekelompok elit yang sedang berkuasa atau untuk memuaskan "nafsu" mereka sendiri akan kekuasaan, itulah sebabnya banyak orang yang skeptis terhadap partai politik. Partai politik hanya menjadi alat bagi segelintir orang yang mampu memanipulasi opini publik untuk memaksakan penerapan kebijakan publik tertentu.

METODE PENELITIAN

Metodologi pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penulisan serta melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap informasi-informasi yang relevan. Bahan hukum primer dapat dijelaskan dengan bahan hukum sekunder, yaitu berbagai karya umum tentang kasus-kasus yang menyangkut hukum tata negara, publikasi di bidang ilmiah atau hukum, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah menguraikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan ke dalam suatu penjelasan metodis, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan.

HADIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mendefinisikan partai politik pada Pasal 1 ayat (1), partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat dikatakan bahwa partai politik, sebagai kelompok warga negara yang diatur secara hukum, mempengaruhi bagaimana negara beroperasi. Namun, partai politik juga memainkan peran penting dalam proses dinamis dalam memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang mereka wakili untuk menetapkan kebijakan dalam kerangka kerja operasi pemerintahan. Keberadaan partai politik merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Ketentuan pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berada di urutan berikutnya, disusul oleh partai politik.

Tujuan lain dari partai politik adalah untuk mensosialisasikan pendidikan politik. Proses di mana seorang individu mengambil orientasi dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka tinggal - sebuah proses yang dikenal sebagai sosialisasi pendidikan politik - juga melibatkan transmisi norma-norma dan nilai-nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan politik disosialisasikan sejak masa kanak-kanak dan dilakukan melalui berbagai organisasi dan kegiatan, termasuk pendidikan formal dan informal, partai politik, dan media massa seperti radio dan televisi. Prinsip-prinsip ideologi dan kesetiaan kepada pemerintah dan partai politik ditanamkan melalui program pendidikan politik. Partai politik dapat mendukung integrasi nasional dan memperkuat identitas nasional, terutama di negara-negara berkembang yang penduduknya sering kali beragam. Oleh karena itu, partai politik harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Karena partai politik adalah

salah satu alat yang digunakan untuk membangun bangsa dan negara yang demokratis, kesetiaan kepada bangsa dan negara, bukan hanya kepada partai, harus ditanamkan.

1. Partai Politik Dalam Sebuah Negara Demokrasi

Dalam demokrasi, berbagai kepentingan akan memunculkan partai-partai politik. Menurut penulis, alasan pertama dari kepentingan-kepentingan tersebut adalah karena orang-orang yang memiliki tingkat ketidakpuasan yang sama cenderung tidak puas terhadap pemerintahan atau rezim yang sedang berkuasa. Kedua: karena adanya ideologi tertentu yang memotivasi mereka sebagai kelompok kepentingan untuk terlibat dalam politik melalui ideologi idealisme mereka. Ketiga: beberapa kelompok yang kuat dalam hal ekonomi, intelektualitas, dan populasi ingin mempertahankan kepentingan mereka sendiri dan memiliki perwakilan di badan pemerintahan. Keempat, mereka dapat memutuskan untuk meninggalkan partai politik karena ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan umum partai tersebut, atau mereka dapat memutuskan untuk membentuk koalisi untuk membentuk partai baru jika mereka memiliki banyak kesamaan karakteristik.

Partai politik dianggap oleh sistem politik Indonesia sebagai sarana utama untuk mengatur demokrasi di negara ini; dengan kata lain, demokrasi tidak dapat hidup di Indonesia tanpa partai politik. Oleh karena itu, undang-undang yang berkaitan dengan partai politik sangat penting untuk menjamin perkembangan organisasi politik yang bermoral dan dijalankan secara profesional. Salah satu masalah yang dihadapi sistem kepartaian di Indonesia adalah bahwa peran partai politik, baik yang ditujukan kepada pemerintah maupun yang melayani rakyat, belum sepenuhnya terwujud. Partai politik melayani kepentingan dan aspirasi rakyat, antara lain dengan mendengarkan dan memperjuangkannya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, partai politik melayani kepentingan negara dengan membentuk pemerintahan yang efektif dan memfasilitasi partisipasi politik dalam pemerintahan yang berkuasa.

Pemilihan umum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi di mana warga negara memiliki hak untuk memilih para pemimpinnya. Dalam konteks ini, partai politik memegang peran penting dalam mengelola proses pemilihan umum dan memperkuat atau merosotkan kualitas demokrasi sebuah negara. Analisis terhadap peran partai politik dalam pemilihan umum tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif, seperti jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen, tetapi juga melibatkan evaluasi kualitatif tentang bagaimana partai politik berkontribusi pada proses demokrasi secara keseluruhan. Partai politik memiliki peran penting dalam memobilisasi pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka melakukan kampanye politik, mengorganisir acara publik, dan menggunakan media massa serta teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mobilisasi ini penting untuk memastikan legitimasi hasil pemilihan umum.

Partai politik juga berperan dalam mengawasi proses pemilihan umum untuk memastikan keadilan dan integritasnya. Mereka dapat mengawasi proses penghitungan suara, mengamati pelaksanaan aturan pemilihan, dan mengawasi penggunaan dana kampanye. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan transparansi dalam proses demokrasi. Partai politik, setelah memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum, bertanggung jawab untuk membentuk kebijakan publik yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mereka berperan dalam proses legislasi, mengajukan proposal kebijakan, dan melakukan negosiasi politik untuk mencapai konsensus di dalam parlemen. Melalui pemilihan umum, partai politik menyediakan alternatif kepemimpinan bagi masyarakat. Mereka mengusulkan kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi syarat untuk memimpin negara atau daerah.

Peran partai politik dalam pemilihan umum memastikan keterwakilan dan pluralisme dalam proses demokrasi. Dengan adanya beragam partai politik, berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat dapat tercermin dalam arena politik. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja partai politik dan kandidat yang mereka dukung. Proses ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Pemilihan umum memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja partai politik dan kandidat yang mereka dukung. Proses ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Partai politik merangsang partisipasi masyarakat dengan mengajak mereka untuk terlibat dalam proses politik dan pemilihan. Peran partai politik dalam pemilihan umum membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan oposisi. Pemilih memiliki kemampuan untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan suara mereka sebagai bentuk kritik atau persetujuan.

Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki kewajiban untuk membantu pembentukan penyelenggara negara yang bebas dari nepotisme, korupsi, dan kolusi (KKN). Dengan cara yang sama, para kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan, terutama mereka yang mencari kursi legislatif, harus menekankan kandidat yang telah menunjukkan komitmen yang tulus untuk melayani masyarakat (provinsi yang akan mereka wakili) daripada hanya bergantung pada popularitas dan jaringan sosial mereka sendiri untuk memenangkan dukungan dan kursi. Pemilih yang bernalar dan berpengetahuan luas sama pentingnya bagi terciptanya pemilu yang jujur. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendidik pemilih tentang politik yang sehat sehingga mereka akan tahu bagaimana menggunakan hak pilih mereka, mampu mengevaluasi proposal kebijakan kandidat yang tampak realistis, mampu menolak politik uang dari kandidat, dan bersedia melaporkan kecurangan pemilu.

Masyarakat akan dapat memilih partai politik yang paling mewakili preferensi mereka karena jumlahnya sangat banyak. Selain itu, partai politik seharusnya dapat menumbuhkan lingkungan yang berfungsi sebagai perekat untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara. Namun yang terjadi justru sebaliknya, melalui intrik-intrik politiknya, partai-partai politik yang dipimpin oleh para elitnya justru memperparah keadaan. Politik uang yang terjadi di berbagai daerah. Mayoritas pelaku politik uang adalah anggota, pengurus, dan pendukung partai masing-masing. Perwakilan pemerintah dan penyelenggara pemilu juga sering terlibat dalam politik uang ini.

Meskipun partai politik memiliki peran yang signifikan dalam pemilihan umum dan proses demokrasi, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi:

- 1) Korupsi dan Kepentingan Khusus; Beberapa partai politik rentan terhadap korupsi dan terjebak dalam kepentingan khusus, yang dapat mengancam integritas proses demokrasi.
- 2) Dominasi Partai Tertentu; dalam sistem politik dapat mengurangi pluralisme dan menghambat partisipasi politik yang sehat.
- 3) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi; dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam partisipasi politik dan akses terhadap proses pemilihan umum.

Kurangnya peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membekukan kepemimpinan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap lemahnya pelembagaan sistem kepartaian. Upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kepemimpinan partai politik masih menjadi tantangan, meskipun masih ada hambatan struktural dan kultural.

Tantangan yang dihadapi dalam sistem politik, terutama terkait dengan peran partai politik, membutuhkan solusi yang komprehensif, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

- 1) Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum; Perlu ada reformasi hukum yang ketat terkait dengan pendanaan partai politik dan sanksi yang tegas terhadap praktik korupsi dan politik uang; Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran etika politik, termasuk politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, akan memperkuat integritas proses demokrasi.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Politik; Pendidikan politik yang lebih luas dan aksesibel dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mengurangi rentan terhadap manipulasi politik; Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan akses informasi akan membantu mengurangi dominasi partai tertentu dan meningkatkan pluralisme politik.
- 3) Penguatan Institusi Pemilihan Umum; Institusi pemilihan umum harus diperkuat dalam hal

pengawasan dan penegakan standar etika politik, serta transparansi dalam proses pemilihan; Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan penguatan lembaga pengawas pemilu dapat mengurangi manipulasi dan kecurangan dalam proses politik.

- 4) Reformasi Internal Partai Politik; Partai politik perlu melakukan reformasi internal untuk memperkuat mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan membatasi pengaruh elite politik yang korup; Pembentukan pedoman dan regulasi yang jelas untuk pengelolaan kepengurusan partai politik dapat membantu memperkuat sistem kepartaian.

2. Peranan Partai Politik dalam Sistem Politik Indonesia

Sebenarnya, kehidupan partai politik bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sebelum "Republik Indonesia" diproklamasikan, partai politik telah ada dan berkontribusi pada munculnya wadah konflik yang menyulut nasionalisme. Serupa dengan bagaimana "Proklamasi Kemerdekaan" menyebabkan munculnya banyak partai politik, "Maklumat Pemerintah 3 November 1945" (yang menyatakan bahwa pemerintah mendorong munculnya partai-partai politik untuk memandu semua aliran pemikiran dalam masyarakat ke arah yang teratur) juga berarti bahwa partai-partai politik menjadi lebih dan lebih umum setelah itu. Namun, ternyata dinamika atau pasang surutnya evolusi sistem politik Indonesia mempengaruhi peran dan fungsi partai politik. Partai politik menunjukkan fungsi dan peran yang signifikan dalam sistem politik Demokrasi Parlementer. Elemen struktural utama dari sistem politik ini adalah parlemen (DPR) dan partai politik. Dukungan partai-partai politik di parlemen sangat penting bagi stabilitas politik dan pemerintahan.

Sistem multi-partai digunakan untuk mengimplementasikan struktur politik ini. Betapa sulitnya membangun pola kerja sama (koalisi) di antara partai-partai politik ketika menyusun kabinet. Tidak ada satu pun kabinet yang dapat menjalankan sisa mandatnya. Fluktuasi kabinet menunjukkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan pada masa itu. Oleh karena itu, pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat kebijakan untuk merampingkan partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Penpres No. 7/1959, yang menjabarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini, Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mendorong pembentukan partai politik dibatalkan. Peraturan Presiden No. 13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai memperkuat Penetapan Presiden tersebut. Peraturan tersebut menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi agar sebuah partai politik dapat didirikan. Prasyarat tersebut antara lain, partai politik harus memiliki cabang di sekurang-kurangnya 25% Daerah Tingkat I dan 25% Daerah Tingkat II. Sebuah partai politik harus memiliki lima puluh orang anggota atau lebih.

Peraturan ini juga menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk mengatur partai politik. Setiap partai politik yang sudah ada harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan persyaratan tersebut. Akibatnya, beberapa partai politik mengajukan permohonan pembentukan kepada pemerintah. Oleh karena itu, banyak partai kecil yang tidak dapat memenuhi persyaratan pemerintah. Pemerintah hanya mengakui PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Murba, PSII-Arudji, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Keputusan Presiden No. 128/1961 memungkinkan adanya pengakuan atau pembubaran partai politik. Selain itu, pemerintah juga mengakui Parkindo dan Partai Islam melalui Keputusan Presiden No. 440/1961. Akibatnya, selama masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah hanya mengakui sembilan partai politik. Dijelaskan pula bahwa karena Presiden menetapkan semua kebijakan politik dan pemerintahan pada masa itu, partai politik hanya memiliki sedikit fungsi dan pengaruh.

3. Partai Politik Dan Pilkada Langsung

Pada akhir tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilu putaran pertama yang diikuti oleh banyak partai atau individu. Tahun 2004, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umum langsung untuk memilih presiden dan wakilnya serta wakil rakyat. Selanjutnya, akan ada pemilihan kepala daerah serentak, juga dikenal sebagai pemilihan langsung, di 269 daerah di Indonesia pada

tanggal 9 Desember 2015. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan ini. Penyelenggaraan pilkada langsung sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia karena lima alasan. 1. Karena presiden dan wakil presiden, serta kepala DPR dan DPD dan kepala desa, semuanya dipilih secara langsung, maka pilkada langsung merupakan solusi bagi kebutuhan dan keinginan rakyat. 2. Konstitusi dan UUD 1945 diwujudkan dalam pemilihan langsung. Sebagai pemimpin pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memuat peraturan yang mengatur hal tersebut. 3. Menggunakan pemilihan langsung sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang politik dan demokrasi (pendidikan kewarganegaraan). Hal ini memberikan masyarakat sebuah forum untuk belajar tentang demokrasi dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan keyakinan moral mereka. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung untuk memperkuat otonomi daerah. Penilaian pemerintah daerah juga mempengaruhi kelangsungan otonomi daerah. Meningkatnya kinerja para pemimpin daerah dalam pilkada langsung 2015 menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai tujuan otonomi daerah serta komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 5. Pemilu langsung adalah instrumen penting untuk merevitalisasi kepemimpinan negara. Jumlah kepemimpinan nasional sangat sedikit, baik kita suka mengakuinya atau tidak. Hanya ada sedikit sekali pemimpin nasional di antara lebih dari 200 juta orang yang menyebut Indonesia sebagai rumah mereka. Sebagian besar dari mereka adalah pemimpin partai politik utama yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu 2011. Oleh karena itu, justru dari pemilihan langsung inilah diharapkan lahir pemimpin-pemimpin nasional.

4. Dampak Multi Partai Terhadap Pilkada Langsung

Sistem ini secara luas dianggap sebagai metode yang paling berhasil dalam mengekspresikan keinginan individu-individu dengan latar belakang ras, agama, atau etnis yang berbeda. Selain itu, jika ada lebih dari dua partai yang diakui secara konstitusional yang beroperasi di dalam batas-batas negara, maka sistem ini lebih tepat untuk sistem yang dikatakan mendukung demokrasi multipartai. Beberapa negara, seperti Indonesia, Filipina, Jepang, Malaysia, Belanda, dan Prancis, memiliki sistem multipartai. Salah satu variasi sistem multipartai yang muncul di dunia kontemporer adalah sistem multi-partai. Jumlah partai politik-lebih dari dua-yang berkembang atau terus bersaing memperebutkan kekuasaan melalui pemilihan umum adalah kunci utama sistem multipartai. Dengan lembaga eksekutif yang sering bertindak tidak jelas dan lemah, lembaga legislatif biasanya menjadi pusat kekuasaan dalam bentuk pemerintahan parlementer. Dibutuhkan koalisi untuk memerintah karena tidak ada satu partai pun yang cukup kuat untuk melakukannya. Ada keuntungan dan kerugian dari setiap sistem kepartaian, dan sistem multi-partai juga demikian. Salah satu praktik demokrasi yang dihasilkan dari kebebasan menyuarakan pendapat dan mewujudkan aspirasi melalui partai politik adalah sistem multi-partai.

Solusi ini dapat diimplementasikan secara holistik dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan meningkatkan integritas demokrasi. Memberikan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran partai politik dalam proses demokrasi, serta hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Menyediakan program pendidikan politik yang berkelanjutan bagi anggota partai politik dan pemilih untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip demokrasi dan tanggung jawab politik. Dengan ini, diharapkan peran partai politik dalam pemilihan umum akan diperkuat, dan sistem demokrasi akan berjalan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kelompok mempengaruhi penyelenggaraan negara. Kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan yang membuat mereka membentuk komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Di negara demokratis seperti Indonesia, pemilihan umum secara berkala memberikan wadah bagi kelompok-kelompok ini untuk menyalurkan aspirasi mereka. Partai politik memainkan peran strategis dalam sistem politik suatu negara, termasuk pendidikan politik, komunikasi, rekrutmen, agregasi kepentingan, dan artikulasi. Mereka sangat penting dalam mendukung pemerintah yang berdaulat untuk kesejahteraan rakyat dan pembuatan kebijakan. Partai politik sangat penting dalam sistem demokrasi, yang berfungsi sebagai jembatan antara proses pemerintahan dan warga negara. Partai politik menentukan kualitas demokrasi, menjadikannya pilar penting dalam sistem politik yang demokratis.

Sistem politik Indonesia menempatkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Untuk memastikan pertumbuhan partai politik yang baik, diperlukan undang-undang. Namun, fungsi partai politik di Indonesia belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga berdampak pada aspek kenegaraan dan publik. Pemilu merupakan landasan sistem demokrasi, dan partai politik memainkan peran penting dalam mengelola proses pemilu dan membentuk kebijakan publik. Partai politik memberikan alternatif kepemimpinan dan mengawasi proses pemilu agar adil dan berintegritas.

Meskipun penting, partai politik menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, dominasi partai tertentu, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, lemahnya pelembagaan sistem kepartaian dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik juga menjadi masalah. Untuk memperkuat peran partai politik dalam pemilu dan demokrasi, peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat, anggota partai politik, dan pemilih sangatlah penting. Hal ini akan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, tanggung jawab politik, dan peran partai politik dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Ni'matul Huda dan Nasef Iman. 2017. Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana: Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Mahmudji Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2014. Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Perundang – undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Jurnal

- Anggita Ramadhan, D. (2019). Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. *Administrative Law and Governance Journal*; Vol 2, No 4.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02),
- Syahrin, M. A. (2020). Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), 146-165.
- Wirman, W., Ihsan, K., & Zulkhoir, I. (2023). Peran Partai Politik dalam Pembinaan Umat Beragama di Kota Medan. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*; Vol 10 No 4.